

Pengaruh Pemerintahan Taliban terhadap Pencapaian Tujuan SDGs 2030 bagi Perempuan di Afghanistan

Siti Salsabila

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang

Email: 2110631260040@student.unsika.ac.id

Maulana Rifai

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang

Email: maulana.rifai@staff.unsika.ac.id

Abstrak

Pemerintahan Taliban yang memperoleh kembali kekuasaan di Afghanistan pada tahun 2021 telah membawa pengaruh signifikan terhadap kehidupan perempuan, khususnya dalam hal akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam kegiatan politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari kebijakan diskriminatif yang diterapkan oleh Taliban terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030, dengan fokus khusus pada kesetaraan gender (SDG 5). Dengan mengadopsi pendekatan teoritis Amartya Sen mengenai lima kebebasan instrumental, yaitu kebebasan politik, kesempatan ekonomi, kesempatan sosial, jaminan adanya keterbukaan, dan jaminan keamanan. Penelitian ini mengungkap bahwa pembatasan terhadap hak-hak perempuan telah memperburuk feminisasi kemiskinan serta larangan yang diterapkan terhadap pendidikan dan pekerjaan telah menghilangkan kesempatan bagi perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Melalui metode penelitian kualitatif, studi ini mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk artikel ilmiah, berita, dan laporan dari lembaga internasional yang membahas kondisi sosial-ekonomi perempuan di Afghanistan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh Taliban telah menghambat kemajuan menuju SDGs 2030 dengan mempersempit ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam sektor publik dan ekonomi. Oleh karena itu, upaya kolektif dari berbagai aktor global menjadi sangat penting dalam memastikan perempuan di Afghanistan tetap memperoleh akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan hak-hak dasar mereka sebagai bagian dari agenda pembangunan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Afghanistan, SDGs, Feminisasi Kemiskinan, Lima Kebebasan Instrumental

Abstract

The Taliban government that regained power in Afghanistan in 2021 has had a significant impact on women's lives, especially in terms of access to education, employment, and participation in political activities. This study aims to analyze the impact of discriminatory policies implemented by the Taliban on the achievement of the 2030 Sustainable Development

Goals (SDGs), with a particular focus on gender equality (SDG 5). By adopting Amartya Sen's theoretical approach regarding the five instrumental freedoms, namely political freedom, economic opportunity, social opportunity, guarantees of transparency, and guarantees of security. This study reveals that restrictions on women's rights have exacerbated the feminization of poverty and restrictions on education and employment have deprived women of opportunities to improve their quality of life. Through qualitative research methods, this study collected data from various relevant literature sources, including scientific articles, news, and reports from international institutions that discuss the socio-economic conditions of women in Afghanistan. The findings of this study indicate that the policies implemented by the Taliban have hampered progress towards the 2030 SDGs by narrowing the space for women to participate in the public sector and the economy. Therefore, collective efforts from various global actors are crucial in ensuring that women in Afghanistan continue to have access to education, employment and their basic rights as part of a sustainable development agenda.

Keywords: Afghanistan, SDGs, Feminization of Poverty, Five Instrumental Freedoms

PENDAHULUAN

Afganistan adalah salah satu negara termiskin di dunia yang hancur akibat konflik selama puluhan tahun. Hal ini, menyebabkan munculnya gerakan fundamentalis Islam, Taliban (Deutsche Welle, 2025). Taliban telah menyerbu ibu kota Afganistan setelah runtuhnya pemerintahan, sebagaimana dilaporkan oleh *Associated Press* mengenai peristiwa yang terjadi di Afganistan pada tanggal 15 Agustus 2021. Presiden Ashraf Ghani melarikan diri dari Kabul dengan menggunakan helikopter setelah seluruh ibu kota provinsi di negara tersebut jatuh ke tangan Taliban dalam waktu kurang dari dua minggu. Perebutan istana kepresidenan oleh Taliban terlihat sebagai kemenangan militer yang mendadak, hampir tepat 25 tahun setelah Taliban terakhir kali mengambil alih ibu kota Kabul pada bulan September 1996 (Associated Press, 2021). Hal itu berawal dari *Doha Agreement* pada Februari 2020, Amerika Serikat dan Taliban menandatangani perjanjian damai yang mencakup ketentuan mengenai penarikan pasukan AS. Proses penarikan ini dimulai secara resmi di bawah kepemimpinan Presiden Trump dan diakhiri di bawah Presiden Biden, sehingga Amerika Serikat secara resmi mengakhiri keterlibatannya di Afganistan, yang menjadi perang terpanjang dalam sejarah Amerika (Bogaert, 2022).

Namun, keberhasilan Taliban ini didasarkan pada perluasan otoritas yang berlangsung secara perlahan tetapi konsisten di seluruh negeri. Hal ini mencakup pembentukan struktur pemerintahan di daerah-daerah yang sebagian besar bersifat pedesaan di bawah kendali dan pengaruh mereka (Associated Press, 2021). Dalam waktu singkat setelah penarikan AS,

pemerintah Afganistan mengalami keruntuhan, dan Taliban mengambil alih kontrol Kabul. Saat ini, Taliban beralih dari posisi pemberontakan menjadi pemerintahan, dengan membentuk pemerintahan formal dan menerapkan kebijakan yang berimplikasi pada kehidupan masyarakat Afganistan, termasuk pembatasan terhadap hak-hak perempuan (Bogaert, 2022).

Hal tersebut membuat perempuan Afganistan berjuang keras untuk meninggalkan negara mereka. Namun, mayoritas dari mereka terjebak di Afganistan. Akibat *Doha Agreement*, tepatnya bulan Agustus, Amerika Serikat mengakhiri kehadiran militernya di Afganistan setelah hampir dua dekade lamanya. Situasi menjadi kacau total, dengan ribuan orang berlarian menuju bandara untuk meninggalkan negara tersebut dengan cara apa pun. Termasuk perempuan, mereka berusaha keras untuk masuk ke dalam pesawat, bersaing dengan pria dalam situasi yang sangat mendesak. Salah satu momen yang takkan terlupakan adalah ketika seorang wanita yang gagal masuk ke dalam pesawat berusaha melemparkan bayi perempuannya melewati kawat berduri, mengarah kepada tentara yang menunggu untuk naik. Wanita yang tidak dapat melarikan diri ke tempat yang lebih aman ini berharap setidaknya putrinya dapat mencapai tujuan yang lebih aman, mengingat ketakutan yang mendalam dan kesadaran akan niat Taliban yang anti-perempuan (Dutta, 2023).

Di bawah kepemimpinan Taliban, perempuan dan anak perempuan mengalami diskriminasi dalam berbagai hal hanya karena identitas gender mereka. Hal ini semakin memperburuk kondisi kemiskinan yang dialami oleh perempuan, menciptakan siklus ketidaksetaraan yang semakin mendalam dan menghambat pencapaian kesetaraan gender di negara tersebut. Taliban memberlakukan hukum Syariah Islam versi mereka sendiri, di mana perempuan dan anak perempuan dilarang (Amnesty International UK, 2024): (1) Pergi ke sekolah untuk belajar; (2) Bekerja; (3) Meninggalkan rumah tanpa mahram; (4) Memperlihatkan kulit mereka di depan umum; (5) Mengakses layanan kesehatan yang diberikan oleh laki-laki (karena perempuan dilarang bekerja membuat layanan kesehatan hampir tidak dapat diakses); (6) Terlibat dalam politik atau berbicara di depan umum. Dengan kebijakan Taliban yang menekan perempuan, terdapat risiko besar terhadap ketertinggalan negara ini dalam mencapai target SDGs, terutama pada aspek gender.

Situasi hak-hak perempuan mengalami kemunduran signifikan menjadikan tantangan besar terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, khususnya pada kesetaraan gender. Pasalnya, sebelum pengambilalihan Taliban, Afganistan telah membuat

beberapa kemajuan dalam pemberdayaan perempuan, terutama dalam akses pendidikan dan pekerjaan. Afganistan memiliki beberapa kamar dagang dan industri, termasuk Kamar Dagang dan Industri Wanita Afganistan (Sustainable Development Goals, 2021). Namun, kebijakan terbaru Taliban justru menghambat atau bahkan membalikkan pencapaian yang telah diraih.

Kebijakan-kebijakan yang regresif dan ketat ini telah menghasilkan dampak sosial-ekonomi yang signifikan akibat pengecualian perempuan dari arena kerja dan pendidikan di Afganistan (Qazizada, 2024). Pada Desember 2022, Kementerian Ekonomi Taliban telah menginstruksikan kepada semua lembaga swadaya masyarakat (LSM) lokal dan internasional yang beroperasi di Afganistan untuk meminta karyawan perempuan mereka berhenti bekerja atau menghadapi pencabutan izin kerja (Limaye, 2023). Padahal, pada konferensi pers pertama Taliban menyatakan, "*Kami akan mengizinkan perempuan untuk belajar dan bekerja dalam kerangka kerja kami. Perempuan akan menjadi sangat aktif dalam masyarakat kami.*"

Di sisi lain, Taliban berpendapat bahwa pendidikan modern dirancang untuk mengalihkan perhatian umat Islam dari tugas agama mereka dan kewajiban mereka untuk membela dan melindungi Islam dari invasi dan distorsi luar. Taliban telah menyebarkan gagasan bahwa pendidikan modern tidak diperlukan bagi perempuan. Pandangan ekstremis ini telah digunakan untuk memicu kekerasan terhadap lembaga pendidikan, khususnya yang menyediakan kesempatan bagi anak perempuan dan wanita, sehingga mengabadikan siklus ketakutan dan penindasan. Tindakan Taliban menggarisbawahi komitmen mereka terhadap ideologi yang memprioritaskan ortodoksi agama dan perlawanan militan daripada pertumbuhan intelektual dan pemberdayaan, khususnya bagi wanita dan anak perempuan (Ahmadi, 2024).

Penelitian sebelumnya yang berjudul "*Efektivitas UN Women Meningkatkan Gender Equality di Afghanistan dalam Pelaksanaan Afghanistan Sustainable Development Goals (A-SDGs)*" yang ditulis oleh Zhafarina Shamimi, Najamuddin Khairur Rijal, dan Mohd. Agoes Afiya menjelaskan program-program dan upaya yang dilakukan oleh UN Women untuk mendorong kesetaraan gender di Afganistan, dengan menguraikan kasus-kasus diskriminasi yang dialami perempuan dan mengevaluasi dampak UN Women di Afganistan melalui A-SDGs (Shamimi, Rijal, & Afiya, 2022). Penelitian lain yang dilakukan oleh Fieza Aqilla Wijaya dengan judul "*Kekerasan Struktural Terhadap Perempuan Afghanistan di Bawah Kepemimpinan Taliban tahun 2021-2024*" mengungkap bahwa keterlibatan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan seringkali menghadapi tantangan dari sejumlah kepercayaan tertentu,

meskipun peran serta perempuan sebenarnya merupakan salah satu tujuan dalam rancangan pembangunan berkelanjutan (Wijaya, 2025).

Studi ini memiliki keunikan secara teori karena mengadopsi kerangka pemikiran Amartya Sen mengenai lima kebebasan instrumental yakni kebebasan politik, kemudahan ekonomi, kesempatan sosial, jaminan transparansi, dan jaminan perlindungan. Pendekatan ini menekankan bahwa kemiskinan tidak hanya berarti tidak adanya penghasilan, tetapi juga tidak adanya kebebasan yang mendasar yang memungkinkan individu untuk menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai yang dianggap penting. Dalam konteks Afghanistan, pembatasan kebebasan wanita oleh Taliban memperlihatkan bagaimana penghilangan lima kebebasan tersebut secara sistematis berdampak. Dengan mengintegrasikan feminisme kemiskinan dan teori kebebasan yang diusulkan oleh Amartya Sen, penelitian ini tidak hanya mengevaluasi dampak kebijakan Taliban secara angka, tetapi juga menyelidiki aspek kualitatif dari pengucilan sosial bagi perempuan.

Penelitian ini memberikan sudut pandang kritis dan beragam yang dapat memperdalam pemahaman mengenai hubungan antara hak asasi manusia, pembangunan berkelanjutan, dan gender di negara yang sedang mengalami konflik. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kebijakan yang diterapkan oleh Taliban berdampak menjadi feminisasi kemiskinan di Afganistan dan bagaimana hal tersebut berpengaruh terhadap pencapaian SDGs 2030, khususnya dalam aspek pemberdayaan perempuan. Penelitian ini memiliki relevansi yang signifikan, karena menawarkan perspektif baru tentang bagaimana kebijakan konservatif dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan, khususnya dalam pemberdayaan perempuan, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung upaya internasional untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketidaksetaraan gender di Afganistan.

METODE PENELITIAN

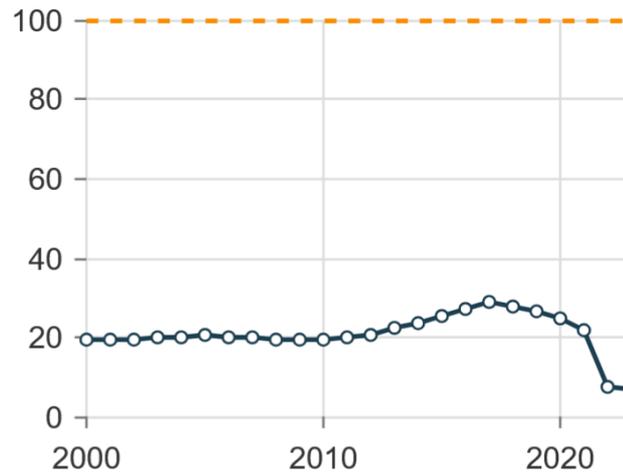
Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, yaitu jenis penelitian yang memberikan temuan-temuan yang tidak bisa diperoleh dengan prosedur statistik atau metode pengukuran kuantitatif lainnya (Rahmadi, 2011). Miles dan Huberman membagi analisis data dalam penelitian kualitatif ke dalam beberapa tahapan analisis yaitu pengkodefikasian/reduksi data, penyajian data, dan penarikan serta pengujian kesimpulan

(Rohidi, 2009). Sedangkan teknik pengumpulan dan analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat berjalan saat proses penelitian dilakukan dan simultan. Artinya penulis berupaya melakukan analisis data pada saat pengumpulan data. Hal ini dapat direpresentasikan sebagai diagram berikut yang menunjukkan proses dan pola pengumpulan dan analisis data dalam penelitian kualitatif (Harahap, 2020). Dan sumber data merujuk kepada subjek yang menjadi asal diperolehnya data. Sumber data adalah entitas atau individu, tempat penulis melakukan observasi, membaca, atau mengajukan pertanyaan tentang informasi tertentu yang relevan dengan isu penelitian (Rahmadi, 2011).

Penelitian ini berfokus pada pengumpulan dan analisis literatur terkait pengaruh kebijakan Taliban terhadap perempuan di Afganistan yang menyebabkan terjadinya feminisasi kemiskinan terhadap pencapaian SDGs. Sumber data berasal dari data sekunder meliputi artikel ilmiah, laporan organisasi, serta dokumen yang mengulas isu gender, kemiskinan, dan dampak kebijakan Taliban pada perempuan dalam aspek pendidikan, pekerjaan, dan kebebasan publik. Yang selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan mengidentifikasi tema-tema terkait pengaruh kebijakan Taliban pada akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial. Data kemudian dikategorikan dan dianalisis untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut menciptakan feminisasi kemiskinan yang akan menghambat pencapaian SDGs 2030 di Afganistan. Validitas temuan akan dijaga dengan mengonfirmasi hasil penelitian dari berbagai sumber yang berbeda, untuk memastikan gambaran yang lebih komprehensif dan mengurangi bias.

HASIL PENELITIAN

Setelah Taliban mengambil alih kekuasaan pada bulan Agustus 2021, mereka mengeluarkan perintah agar perempuan tinggal di rumah dengan alasan bahwa prajurit mereka "tidak terbiasa melihat perempuan di luar rumah dan tidak dilatih untuk menghormati perempuan". Pembangunan berkelanjutan, khususnya yang berfokus pada perempuan di Afganistan, mengalami penurunan drastis dalam satu tahun pemerintahan Taliban. Hal ini menunjukkan bahwa segregasi gender dan pembatasan gerakan perempuan tetap menjadi dasar dari visi mereka terhadap masyarakat. Dalam hal hak-hak perempuan, Afganistan kembali ke era yang lebih gelap (UN Women, 2023). Hal ini ditunjukkan melalui rasio SDGs kesetaraan gender sebagai berikut:



Gambar 1. Rasio Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Dibandingkan Laki-laki di Afghanistan

Sumber: <https://dashboards.sdgindex.org/profiles/afghanistan/indicators>

Berdasarkan data di atas rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki di Afghanistan mengalami penurunan drastis sejak tahun 2020. Pada tahun 2020, rasio ini masih berada di angka 24.69%, kemudian menurun menjadi 21.84% pada 2021. Tren penurunan ini semakin tajam pada tahun-tahun berikutnya, dengan angka 7.35% pada 2022 dan 6.99% pada 2023. Penurunan yang sangat signifikan ini erat kaitannya dengan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintahan Taliban sejak kembali berkuasa pada Agustus 2021. Sejumlah regulasi yang membatasi akses perempuan ke pekerjaan, larangan bagi perempuan untuk bekerja di sektor tertentu, serta pembatasan ruang publik bagi mereka telah memperburuk kondisi ketidaksetaraan gender di Afghanistan.

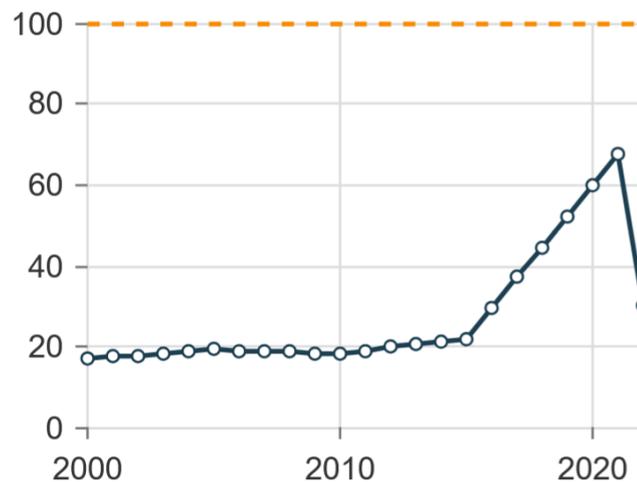
Di sisi lain, ketidaksetaraan itu memperburuk keadaan dan berkontribusi terhadap kegagalan ekonomi, yang mengakibatkan kerugian ekonomi hingga \$1 miliar—sekitar 5% dari PDB Afghanistan. Sangat penting bagi perempuan untuk diizinkan bekerja dan diikutsertakan dalam setiap kesempatan untuk berkontribusi terhadap ekonomi lokal mereka dan kelangsungan hidup negara mereka (International Rescue Committee, 2022). Jaminan terhadap keterbukaan di Afghanistan juga terancam di bawah kepemimpinan Taliban. Perempuan dilarang menggunakan riasan wajah termasuk cat kuku. Hal ini mengancam perempuan Afghanistan menjalankan bisnis seperti salon kecantikan, Seluruh salon kecantikan dan salon rambut di seluruh Afghanistan harus ditutup dalam waktu satu bulan, demikian perintah Taliban pada Juli 2023, tanpa menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut. Perintah itu otomatis akan memaksa penutupan ribuan bisnis yang dijalankan oleh

perempuan. Diperkirakan bahwa lebih dari 50.000 perempuan Afganistan akan kehilangan pekerjaan (DetikNews, 2023).

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), pendapatan ekonomi tahunan akibat pelarangan perempuan bekerja di Afganistan diperkirakan mencapai USD 1 miliar, atau setara dengan 5% dari PDB. Secara global, pelarangan ini menempatkan Afganistan pada peringkat ke-177 dari 177 negara dalam hal keterlibatan perempuan, berdasarkan Indeks Perdamaian dan Keamanan Perempuan Universitas Georgetown (Georgetown University's Institute for Women, Peace and Security, 2023). Laporan dari Organisasi Perburuhan Internasional tahun 2022 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Afganistan pada tahun 2020 hanya mencapai 19%, yang merupakan empat kali lebih rendah dibandingkan dengan partisipasi laki-laki, yakni 81%. Sejak berada di bawah kepemimpinan Taliban, kondisi partisipasi perempuan dalam angkatan kerja semakin memburuk. Pada kuartal ketiga tahun 2021, setelah runtuhnya pemerintahan republik di Afganistan, tingkat ketenagakerjaan perempuan menurun menjadi 16,7% (International Labour Organization, 2022). Pada bulan Januari 2022, diproyeksikan bahwa tingkat ketenagakerjaan perempuan pada kuartal kedua tahun 2022 akan menjadi sekitar 25% lebih rendah dibandingkan dengan kuartal kedua tahun 2021, dengan asumsi tidak ada perubahan kebijakan yang positif — sebuah perkembangan yang sangat mengkhawatirkan (UNDP, 2023).

Sejak tahun 2021, *World Economic Forum* (WEF) telah menerbitkan data yang menggugah perhatian, yaitu *Global Gender Gap*. Berdasarkan laporan *Global Gender Gap* 2021, Afganistan menempati peringkat ke-156 dari 156 negara, menjadikannya salah satu negara dengan kesenjangan gender terbesar di dunia, dengan persentase peluang kesempatan dan partisipasi ekonomi perempuan hanya sebesar 18%. Rata-rata peran profesional dan teknis yang dipegang oleh perempuan di Afganistan adalah 19,3%. Kehadiran perempuan di posisi senior bahkan lebih minim, dengan proporsi hanya mencapai 4,1%. Sebagai akibatnya, terdapat ketimpangan pendapatan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan di negara tersebut. Rata-rata pendapatan perempuan di Afganistan kurang dari 16% dari pendapatan rata-rata laki-laki (The World Economic Forum, 2021). Menurut laporan *Sustainable Development Report* 2021, rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dibandingkan laki-laki hanya mencapai 21,8 %. Selain itu, rasio rata-rata tahun pendidikan yang diterima oleh perempuan dan laki-laki menunjukkan penurunan dari 67,95% pada tahun

2021 menjadi 30,01% pada tahun 2022. Sementara itu, proporsi kursi yang diisi oleh perempuan di parlemen nasional mengalami stagnasi, tetap di bawah 30% (Sustainable Development Report, 2024). Dengan adanya kebijakan diskriminatif tersebut, Afghanistan semakin menghadapi tantangan untuk mencapai tujuan-tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030. Feminisasi kemiskinan akan semakin memperburuk ketidaksetaraan sosial-ekonomi yang telah ada.



Gambar 2. Rasio Rata-rata Tahun Pendidikan yang Diterima Perempuan Dibandingkan Laki-laki di Afghanistan

Sumber: <https://dashboards.sdqindex.org/profiles/afghanistan/indicators>

Data mengenai rasio rata-rata tahun pendidikan yang diterima perempuan dibandingkan laki-laki di Afghanistan menunjukkan tren peningkatan yang signifikan antara tahun 2015 hingga 2021, sebelum akhirnya mengalami penurunan drastis pada 2022. Pada tahun 2015, rasio ini hanya mencapai 21.8%, namun secara bertahap meningkat menjadi 29.43% pada 2016, 37.08% pada 2017, 44.76% pada 2018, dan 52.46% pada 2019. Tren positif ini terus berlanjut hingga 60,19% pada 2020 dan mencapai puncaknya di 67.95% pada 2021, mencerminkan perkembangan yang cukup baik dalam akses pendidikan bagi perempuan Afghanistan. Namun, perubahan politik yang terjadi pada Agustus 2021, ketika Taliban kembali berkuasa, menyebabkan kemunduran yang sangat drastis dalam pendidikan perempuan. Pada tahun 2022, rasio ini jatuh ke angka 30,01%, hampir setengah dari capaian tahun sebelumnya.

Tingkat melek huruf di kalangan perempuan juga tergolong rendah, yaitu hanya 53,7% di negara tersebut (The World Economic Forum, 2021). Di Afghanistan, sebagian besar gadis remaja masih belum diizinkan untuk kembali bersekolah, risiko pernikahan dini kini menjadi

lebih tinggi (International Rescue Committee, 2022). Padahal, pendidikan mempengaruhi kapasitas mereka untuk berkontribusi dalam pembangunan. Pada tahun 2014, Ashraf Ghani menjadi presiden Afganistan dan membuka akses ke pendidikan, membuat peningkatan secara signifikan di perkotaan dan pedesaan, dan kursus swasta memungkinkan anak perempuan untuk belajar bahasa Inggris dan terlibat dengan dunia (Nehan, 2022). Sedangkan, menurut laporan *Women, Peace, and Security Index 2023-2024*, di Asia Selatan Afganistan menjadi negara terburuk terkait kesempatan dalam pendidikan dari dibandingkan dengan Sri Lanka (Georgetown University's Institute for Women, Peace and Security, 2023).

Pada 12 November 2021, UNICEF melalui Pernyataan Direktur Eksekutif, Henrietta Fore mengatakan bahwa UNICEF menerima laporan yang dapat dipercaya tentang keluarga yang menawarkan anak perempuan mereka yang berusia hingga 20 hari untuk dinikahkan di masa mendatang dengan imbalan mas kawin. UNICEF memperkirakan bahwa 28 persen perempuan Afganistan berusia 15–49 tahun menikah sebelum usia 18 tahun (Mekki, 2021). Menurut data dari *The Global Gender Gap Index*, pada 2022 Afganistan berada di urutan 107 dari 146 negara, sedangkan pada 2023 turun ke posisi terakhir yaitu 146 (World Economic Forum, 2023). Dalam hal ini, Taliban membuat perempuan Afganistan menghadapi situasi yang sangat berat terkait kekerasan politik. Per 100.000 perempuan, terdapat 0.462 kekerasan yang mengarah pada perempuan di negara tersebut (Georgetown University's Institute for Women, Peace and Security, 2023). Tanpa suara politik, perempuan kehilangan kemampuan untuk memengaruhi keputusan yang berpotensi memperbaiki kehidupan mereka, seperti kebijakan ekonomi yang akan membuat mereka semakin terperangkap dalam kemiskinan yang dipicu oleh ketidaksetaraan yang ada.

PEMBAHASAN

Perempuan dan anak perempuan Afganistan telah mencapai kemajuan yang signifikan menuju kesetaraan setelah kejatuhan Taliban dari kekuasaan pada tahun 2001. Selama dua puluh tahun periode di bawah sistem republik, perempuan Afganistan terlibat aktif dalam berbagai aspek kehidupan publik. Mereka berpartisipasi dalam beragam sektor bisnis, termasuk produksi kerajinan tangan, kuliner, serta barang-barang lainnya yang dihasilkan di rumah, serta menjabat sebagai eksekutif di perusahaan-perusahaan konstruksi, ekspor, dan impor. Selain itu, perempuan juga berprofesi sebagai pendidik, seperti guru dan profesor,

serta berperan dalam berbagai posisi administratif, dan di bidang kesehatan sebagai dokter, perawat, dan bidan. Peranan perempuan juga sangat signifikan dalam lembaga layanan sipil dan media. Perempuan mengambil peran sebagai jurnalis dan menjalankan tugas di berbagai posisi di media. Mereka juga berperan sebagai perwira militer dan polisi, jaksa, serta hakim. Keterlibatan mereka dalam olahraga, musik, dan seni semakin meningkat seiring dengan bertambahnya kebebasan berekspresi, akses media, dan kebebasan bergerak. Mereka telah berjuang dan berhasil memperoleh kesetaraan konstitusional serta menduduki berbagai jabatan sebagai pegawai negeri, menteri, wakil menteri, gubernur, dan anggota parlemen. Selain itu, mereka juga memberikan suara dalam jumlah yang signifikan (Feminist Majority Foundation, 2025).

Sebuah isu yang semakin memburuk setelah pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban pada 2021. Mereka telah memperkenalkan serangkaian undang-undang yang mengabaikan hak-hak dasar perempuan dan anak perempuan di seluruh Afghanistan. Karyawan perempuan dipulangkan, sekolah menengah untuk anak perempuan ditutup, dan perempuan dilarang masuk universitas (Hein, 2024). Padahal, dalam konferensi persnya yang dilakukan setelah mereka menguasai Kota Kabul, Taliban membuat jaminan kepada warga Afghanistan dan dunia, termasuk Taliban akan bekerja dengan perempuan, tetapi dengan batas-batas hukum syariah (Martin & Saputro, 2024). Ketidakmampuan untuk bekerja dan berpendidikan membuat perempuan lebih rentan terhadap kemiskinan struktural. Selain itu, dalam situasi kekerasan yang sering terjadi, semakin mempersulit perjuangan mereka untuk bertahan hidup.

Taliban merupakan kelompok fundamentalis Islam yang memaksakan interpretasi mereka terhadap hukum Islam dan menghilangkan pengaruh asing di Afghanistan. Wanita diwajibkan mengenakan burqa yang menutupi seluruh tubuh, perempuan dilarang untuk belajar atau bekerja, dan tidak diperkenankan bepergian tanpa pendamping (Azria & Ramayani, 2022). Pada 15 Agustus 2021, para pejuang Taliban memasuki ibu kota dan mengumumkan bahwa mereka telah memasuki Istana Presiden serta mendirikan pos pemeriksaan untuk menjaga keamanan. Kekhawatiran akan kembalinya rezim Taliban tidak hanya dirasakan di Afghanistan, tetapi juga oleh masyarakat internasional, terutama terkait dengan pembatasan hak-hak perempuan di hampir semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, serta kebebasan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan ekonomi (Azria & Ramayani, 2022). Fenomena ini memperlihatkan perempuan terpaksa

menghadapi kebijakan diskriminatif di bawah pemerintahan Taliban yang membuat mereka mengalami kemiskinan.

Sylvia Chant (2006) menegaskan dimensi kemiskinan yang lebih luas bagi perempuan dan perempuan kepala keluarga, menunjukkan bahwa perempuan mengalami insiden kemiskinan yang tertinggi, mengalami kemiskinan yang lebih dalam dan berkualitas buruk, lebih rentan terhadap kemiskinan jangka panjang, menanggung beban berat dalam kemiskinan, serta menghadapi lebih banyak tantangan untuk keluar dari kemiskinan. Selain itu, perempuan lebih rentan jatuh miskin ketika berperan sebagai kepala keluarga, menjadi kelompok yang paling miskin dalam peran tersebut, dan cenderung mewariskan kemiskinan kepada anak-anak mereka, yang dikenal sebagai kemiskinan lintas generasi (Hasan, Siscawati, & Kusniati, 2023). Di Afganistan, hampir 80% dari mereka yang membutuhkan adalah perempuan dan anak-anak, sebagian besar akibat krisis ekonomi, di samping pembatasan yang diberlakukan terhadap perempuan di masyarakat. Para ibu terpaksa mengirim anak-anak mereka bekerja untuk mendapatkan cukup uang guna membeli makanan, yang menyebabkan peningkatan tajam dalam pekerja anak (International Rescue Committee, 2022). Hal ini juga mendorong lebih banyak keluarga ke dalam jurang kemiskinan dan memaksa mereka untuk membuat pilihan yang sulit, seperti menikahkan anak perempuan di usia muda (Mekki, 2021). Fenomena ini menunjukkan perempuan secara proporsional lebih terdampak oleh kemiskinan dibandingkan laki-laki, menyebabkan apa yang disebut sebagai feminisasi kemiskinan.

Feminisme kemiskinan menurut Scott dalam Yanti (2025) merupakan istilah yang menggambarkan situasi di mana perempuan secara individual harus memikul beban ekonomi keluarga. Hal ini terjadi ketika perempuan terpaksa menjadi penyokong ekonomi keluarga secara mandiri (Yanti, 2025). Feminisasi kemiskinan di Afganistan tidak hanya mengacu pada jumlah perempuan yang hidup dalam kondisi miskin, tetapi juga bagaimana mereka mengalami kemiskinan secara lebih mendalam, seperti melalui keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Berdasarkan lima jenis kebebasan instrumental yang dikemukakan oleh Amartya Sen (Sen, 1999), yang dianggap sebagai landasan untuk memahami dinamika kebebasan individu dalam mencapai kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik. Lima kebebasan tersebut adalah: 1) kebebasan politik, 2) kesempatan ekonomi, 3) kesempatan sosial, 4) jaminan adanya keterbukaan, dan 5) jaminan keamanan. Feminisasi kemiskinan di Afganistan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga

masalah hak dan kebebasan perempuan, perlu adanya upaya untuk memulihkan hak-hak perempuan di negara tersebut.

SDGs dapat dianggap sebagai manifestasi praktis dari teori pembangunan manusia Amartya Sen, di mana tujuan penelitian ini akan menganalisis pembatasan yang dilakukan Taliban berpengaruh terhadap perempuan Afghanistan dalam mencapai potensi penuh mereka yang semakin memperburuk kemiskinan dan ketidaksetaraan. Ketidaksetaraan ini disebabkan oleh kebijakan Taliban yang secara sistematis membatasi hak pendidikan perempuan yang secara langsung bertentangan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) terutama SDG 5 Kesetaraan Gender yang menekankan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan.

Dalam kebebasan politik, sebelum Taliban kembali menguasai Afghanistan, perempuan mengalami kemajuan pesat yang dapat dikatakan sebagai gerakan revolusioner. Perempuan dapat berpartisipasi dalam politik dan bekerja sebagai pegawai negeri bahkan advokasi di masyarakat sipil dan media. Partisipasi perempuan dalam kehidupan publik terus berkembang sebagaimana dibuktikan oleh partisipasi dan kepemimpinan progresif perempuan Afghanistan di berbagai bidang di seluruh negeri (Nehan, 2022). Namun, setelah Taliban kembali, melalui Petingginya Taliban menilai bahwa perempuan tidak perlu berada dalam pemerintahan, mereka menganggap perempuan tidak sepatutnya memimpin kaum laki-laki. Juru bicara Taliban juga pernah melontarkan pernyataan diskriminatif terhadap peran perempuan. Ia menyebut bahwa tugas seorang perempuan hanyalah melahirkan dan membesarkan anak. Secara tidak langsung pernyataan tersebut telah membatasi perempuan Afghanistan dalam hal politik dan edukasi (Lestari, 2021). Ketika perempuan tidak dilindungi dari kekerasan politik, mereka tidak dapat berpartisipasi dalam upaya pemulihan. Pembuat kebijakan harus melihat kekerasan politik sebagai masalah pembangunan berkelanjutan (Georgetown University's Institute for Women, Peace and Security, 2023).

Kesempatan ekonomi perempuan Afghanistan sebelum kembalinya Taliban ditunjukkan dengan kewirausahaan dalam bisnis juga adanya pemberdayaan ekonomi dan mendorong banyak keluarga untuk mengizinkan anak perempuan mereka tidak hanya belajar, tetapi juga bekerja dan mengambil bagian dalam pembangunan negara mereka (Nehan, 2022). Sedangkan, ketika Taliban menguasai Afghanistan mereka memberlakukan pembatasan terhadap akses perempuan terhadap pekerjaan (International Rescue Committee, 2022). Seringkali, peningkatan pendapatan per kapita atau Produk Domestik Bruto (PDB) dijadikan

sebagai ukuran utama untuk menilai pembangunan. Namun, patut diperhatikan bahwa perkembangan ini tidak jarang diiringi oleh kesenjangan sosial, terutama ketika terdapat ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan. Salah satu bentuk kesenjangan yang muncul dalam proses pembangunan adalah kemiskinan (Indarti, 2017). Di bawah pemerintahan Taliban, perempuan dihadapkan pada pembatasan ketat terhadap akses mereka ke peluang ekonomi, pekerjaan, dan kewirausahaan. Bahkan, jika perempuan bekerja, kelompok Taliban akan mengawal mereka pulang dan memerintahkan untuk kerabat laki-laki perempuan tersebut saja yang bekerja. Seorang guru dilarang memberikan pelajaran untuk siswa yang berjenis kelamin berbeda. (Lestari, 2021). Artinya, banyak guru perempuan yang kehilangan pekerjaannya karena anak perempuan mengalami pembatasan terhadap akses pendidikan.

Serta perempuan Afganistan sendiri telah aktif dalam berbagai organisasi kemanusiaan khususnya menegakan kebebasan serta kesetaraan bagi kaum perempuan hingga akhirnya Taliban memberlakukan peraturan yang membatasi kemampuan mereka untuk bekerja dan melakukan apa yang diinginkan (Lestari, 2021). Meskipun beberapa perempuan diizinkan bekerja di sektor kesehatan atau pendidikan dengan pembatasan tertentu, peluang kerja secara umum sangat terbatas. Ini secara langsung mengurangi akses perempuan terhadap pendapatan dan kemerdekaan ekonomi (The World Economic Forum, 2021). Sen menekankan bahwa pembangunan lebih dari sekadar peningkatan PDB, melainkan tentang meningkatkan kebebasan individu untuk memilih cara hidup yang mereka anggap penting, termasuk akses ke pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi (Indarti, 2017).

Menurut Sen, pembangunan manusia terjadi ketika individu diberi kebebasan untuk memilih kehidupan yang mereka anggap bernilai, melalui pemberdayaan untuk mengakses berbagai pilihan yang memadai, seperti pendidikan, kesehatan, dan hak-hak dasar lainnya. Dengan pendekatan ini, kemiskinan tidak hanya diukur dengan pendapatan, tetapi dengan kekurangan kebebasan untuk melakukan hal-hal yang seseorang anggap penting dalam hidup mereka (Indarti, 2017). Pada bulan Mei 2022, kaum perempuan diperintahkan untuk mengenakan cadar di depan umum. Sejumlah perempuan dipukuli karena menuntut hak-hak mereka (BBC, 2022). Musik adalah ilegal menurut hukum Syariah. Taliban telah menghukum mereka yang memainkan musik atau menari dengan nada di pesta-pesta (Evandio, 2021). Sehingga perempuan dilarang bermain musik dan menari, mewajibkan perempuan untuk mengenakan burqa (pakaian yang menutup seluruh tubuh), dilarang berbicara menggunakan suara yang keras hingga terdengar oleh orang asing baik dalam pertemuan perempuan

maupun di depan umum, dilarang menggunakan sepatu hak tinggi, dilarang menampilkan gambar perempuan baik dalam perfilman maupun media yang lainnya (Lestari, 2021). Artinya, perempuan harus meninggalkan lapangan pekerjaannya seperti penyanyi, penari, model, atau aktris.

Dengan adanya kebijakan semacam itu, perempuan di Afganistan terperangkap dalam lingkaran kemiskinan yang sulit untuk diputus. Larangan yang diterapkan oleh Taliban terhadap partisipasi perempuan dalam pekerjaan dan pendidikan tetap tidak berubah dan telah menimbulkan konsekuensi ekonomi yang parah bagi Afganistan dan penduduknya. Larangan ini melemahkan peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat, memengaruhi aliran bantuan, meningkatkan kemiskinan, serta membatasi pertumbuhan ekonomi (UNDP, 2023). Pada tahun 2021, pemerintah Taliban melarang anak-anak perempuan untuk menempuh pendidikan setelah kelas 6 Sekolah Dasar (SD), yang biasanya terjadi pada usia sekitar 13 tahun. Pada bulan Oktober 2022, pihak berwenang mengizinkan perempuan yang belum menyelesaikan tahun terakhir sekolah, untuk mengikuti ujian masuk universitas, harapan mulai tumbuh kembali. Namun, pada tanggal 20 Desember 2022, Menteri Pendidikan Tinggi Taliban mengeluarkan perintah untuk menanggukkan seluruh kegiatan pendidikan perempuan di semua universitas, baik negeri maupun swasta, hingga pemberitahuan lebih lanjut (Limaye, 2023).

Menurut laporan PBB Lebih dari 330.000 anak perempuan di Afganistan dilarang melanjutkan studi mereka di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun 2024 (BBC Indonesia, 2023). Kebijakan yang diterapkan terhadap partisipasi perempuan dalam pendidikan telah mengakibatkan penderitaan yang mendalam bagi masyarakat, serta merusak kondisi sosial dan ekonomi serta prospek masa depan. Oleh karena itu, tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk Afganistan, yang sudah sulit untuk dicapai, kini semakin menjauh dari realisasi (UNDP, 2023). Khususnya terkait dengan kesetaraan gender.

Sehubungan dengan hal tersebut, *International Labour Office* (ILO) menyatakan bahwa perempuan miskin lebih menderita, disebabkan oleh kenyataan bahwa di banyak masyarakat, perempuan menjadi subjek dari nilai-nilai sosial yang membatasi mereka dalam upaya meningkatkan kondisi ekonomi atau memperoleh akses yang setara terhadap layanan publik (International Labour Office, 2004). Kondisi ini berkontribusi pada ketidakmerdekaan perempuan dalam menentukan hak, kewajiban, dan tanggung jawab mereka sendiri.

Amartya Sen, sebagaimana diungkapkan oleh (Indarti, 2017), menyatakan bahwa pembangunan seharusnya dipahami sebagai proses perluasan kebebasan (*freedom*) melalui penegakan hak-hak dasar manusia (*entitlement*) di satu sisi dan pengembangan kapabilitas manusia (*human development*) di sisi lainnya. Pada tahun 1981, Amartya Kumar Sen mulai menarik perhatian dalam bidang ekonomi politik berkat karyanya yang berjudul *Poverty and Famine: An Essay on Entitlement and Deprivation*. Sen berpendapat bahwa kemiskinan dan kelaparan tidak hanya disebabkan oleh bencana alam, tetapi juga oleh kediktatoran dalam sistem politik suatu negara (Sen, 1999).

Pembangunan yang berlandaskan kebebasan dan demokrasi akan menghasilkan kesejahteraan sosial, sehingga mampu mencegah terjadinya kemiskinan massal atau setidaknya mempercepat pemulihan dari kondisi tersebut, yang pada akhirnya berujung pada perubahan sosial (Indarti, 2017). Kebebasan politik merujuk pada hak individu untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, termasuk hak suara, kebebasan berbicara, dan kebebasan berserikat. Yang tentunya berhubungan dengan kesempatan ekonomi, dimana peraturan akan dibentuk dan akan mempengaruhi bagaimana perempuan mendapatkan akses terhadap pekerjaan, pendapatan, dan peluang ekonomi lainnya. Dan kesempatan sosial seperti pendidikan mempengaruhi kapasitas mereka untuk berkontribusi dalam pembangunan atau justru memperburuk kemiskinan yang dialami perempuan. Serta jaminan terhadap keamanan mencakup perlindungan terhadap individu dari ancaman fisik dan psikis. Sebab, ketidakamanan akan menghalangi perempuan untuk mencapai potensi penuh mereka, mengurangi kemampuan mereka untuk bekerja, belajar, atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang akan memperburuk feminisasi kemiskinan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemerintahan Taliban secara sistematis telah membatasi hak-hak perempuan di Afghanistan, khususnya dalam hal akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik. Pembatasan tersebut berpengaruh langsung terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030, terutama SDGs 5 mengenai Kesetaraan Gender. Setelah dua dekade mengalami kemajuan di berbagai sektor, perempuan di Afghanistan saat ini menghadapi kemunduran

yang signifikan akibat kebijakan diskriminatif yang diterapkan oleh Taliban. Larangan pendidikan bagi perempuan setelah tingkat sekolah dasar, pembatasan terhadap peluang kerja, serta pembungkaman suara perempuan dalam kehidupan publik semakin memperburuk kondisi feminisasi kemiskinan. Kebijakan ini tidak hanya menghalangi perempuan dalam mencapai potensi penuh mereka, tetapi juga memperburuk kondisi sosial-ekonomi negara secara keseluruhan.

Dalam perspektif pembangunan manusia yang dikemukakan oleh Amartya Sen, Taliban telah merampas kebebasan instrumental perempuan, yang meliputi kebebasan politik, kesempatan ekonomi, kesempatan sosial, jaminan adanya keterbukaan, dan jaminan keamanan. Dampak dari kebijakan ini tidak hanya memperburuk kemiskinan struktural, tetapi juga menimbulkan efek jangka panjang yang meliputi peningkatan pekerja anak, pernikahan dini, serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Oleh karena itu, pemerintahan Taliban tidak hanya menghambat pencapaian SDGs di Afghanistan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang semakin menekan perempuan dalam lingkaran kemiskinan dan ketidaksetaraan, yang dikenal sebagai feminisasi kemiskinan. Jika kebijakan ini terus berlanjut tanpa adanya intervensi global, maka pencapaian tujuan SDGs 2030, khususnya dalam aspek kesetaraan gender dan pengentasan kemiskinan, akan semakin sulit direalisasikan di Afghanistan.

Saran

Untuk mengatasi dampak negatif pemerintahan Taliban terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030 bagi perempuan di Afghanistan, diperlukan strategi intervensi yang disusun baik dari segi konsep maupun operasional. Secara konseptual, SDGs menjadikan kesetaraan gender tidak hanya dilihat sebagai tujuan yang berdiri sendiri (Tujuan ke-5), dalam Debat Umum Sidang ke-66 Majelis Umum PBB pada tahun 2011, yang menegaskan bahwa potensi perempuan di seluruh dunia belum sepenuhnya terealisasi karena masih adanya kesenjangan dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik (United Nations, 2025). Ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya, keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, serta perlindungan hukum yang tidak konsisten merupakan tantangan struktural yang perlu diatasi untuk mencapai pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengarusutamaan gender bukan hanya masalah

keadilan, tetapi juga merupakan strategi pembangunan yang penting untuk membangun masyarakat yang kuat dan setara.

Secara praktis, negara dan organisasi internasional seperti PBB dan UN Women dapat memberikan tekanan diplomatik serta menerapkan sanksi khusus terhadap pemimpin Taliban yang bertanggung jawab atas kebijakan yang represif, sambil tetap menjaga kestabilan kemanusiaan. Selain itu, dukungan bagi organisasi lokal serta penyediaan platform pembelajaran online yang aman merupakan langkah krusial untuk menjaga akses perempuan terhadap informasi. Untuk mendukung rencana pembangunan yang berkelanjutan, penelitian tentang keberlanjutan harus diarahkan kepada pendekatan yang lebih integratif, melibatkan berbagai disiplin ilmu, dan sesuai dengan konteks yang ada. Dengan memusatkan perhatian pada pengidentifikasian masalah, tetapi juga mendorong solusi yang praktis dan berlandaskan pada kebutuhan perempuan di Afganistan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, B. (2024). *Erosion of Women's Rights. In T. S. Press, Still Here—Understanding and Engaging with Afghanistan After August 2021*. Denmark: The Scandinavian Military Press.
- Amnesty International UK. (2024). "Women in Afghanistan: The Back Story", *Amnesty International UK*. Tersedia dalam <https://www.amnesty.org.uk/womens-rights-afghanistan-history> diakses pada Kamis, 27 Januari 2025.
- Associated Press. "Taliban sweep into Afghan capital after government collapses", *AP News*. 2021 August 16. Tersedia dalam <https://apnews.com/article/afghanistan-taliban-kabul-bagram-e1ed33fe0c665ee67ba132c51b8e32a5> diakses pada Minggu, 30 Maret 2025.
- Azria, K., & Ramayani, E. (2022). "Sejarah Perang Afganistan dari Dulu hingga Kini", *Jurnal PIR*, 6 (2): 123-126.
- BBC Indonesia. (2023). "Ratusan Ribuan Anak Perempuan Afghanistan Dilarang Sekolah oleh Taliban", *DetikNews*, 23 Maret. Tersedia dalam <https://news.detik.com/bbc-world/d-7258025/ratusan-ribu-anak-perempuan-afghanistan-dilarang-sekolah-oleh-taliban> diakses pada Kamis, 27 Januari 2025.
- BBC. (2022). "Afghanistan: Taliban leader orders Sharia law punishments", *BBC*, 14 November. Tersedia dalam <https://www.bbc.com/news/world-asia-63624400> diakses pada Kamis, 27 Januari 2025.
- Bogaert, H. (2022). "History Repeating Itself: The Resurgence of the Taliban and the Abandonment of Afghan Women", *Immigration and Human Rights Law Review*, 4 (1): 8-9.
- Burhan, F. Z. (2020). "Pembebasan Jerat Feminisasi Kemiskinan", *Al-Ma'arief: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*, 2 (1): 9-14.
- DetikNews. (2023). "Taliban Tutup Salon Kecantikan, Wanita Afghanistan Semakin Menderita", *Detik.Com*, 8 Juli. Tersedia dalam <https://news.detik.com/dw/d-6812374/taliban-tutup-salon-kecantikan-wanita-afghanistan-semakin-menderita> diakses pada Kamis, 27 Januari 2025.
- Deutsche Welle. (2025). "Afganistan", *DW.com*. Tersedia dalam <https://www.dw.com/id/afganistan/t-45384260> diakses pada Kamis, 27 Januari 2025.

- Dutta, M. (2023). "Disappearing Afghan Women from Public Spaces — Collapse of Women's Rights in Afghanistan", *Centre for Inner Asian Studies*, 86.
- Evandio, A. (2021). "13 Aturan Taliban untuk Wanita Afghanistan, Ini Hukumannya bila Dilanggar", *Bisnis.Com*, 7 September. Tersedia dalam <https://kabar24.bisnis.com/read/20210907/19/1439328/13-aturan-taliban-untuk-wanita-afghanistan-ini-hukumannya-bila-dilanggar> diakses pada Kamis, 27 Januari 2025.
- Feminist Majority Foundation. (2025). "Progressive Achievements of Afghan Women and its Catastrophic Reversals by the Taliban", *Feminist Majority Foundation*. Tersedia dalam https://feminist-org.translate.goog/our-work/afghan-women-and-girls/afghanistan-since-the-taliban-takeover/?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=tc diakses pada Minggu, 30 Maret 2025.
- Georgetown University's Institute for Women, Peace and Security. (2023). *Women, Peace, and Security Index 2023/24: Tracking sustainable peace through inclusion, justice, and security for women*. Washington DC: GIWPS & PRIO.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal ashri Publishing.
- Hasan, A. M., Siscawati, M., & Kusniati, S. (2023). "Feminisasi Kemiskinan: Akses dan Kontrol Perempuan pada Program Keluarga Harapan di Masa Covid-19". *DHARMASMRTI: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan*, 23 (1): 71-75.
- Hein, S. v. (2024). "Perempuan Afganistan Berinisiatif Sendiri Perjuangkan Hak", *Deutsche Welle*, 17 Juli. Tersedia dalam <https://www.dw.com/id/hak-perempuan-afganistan/a-69664730> diakses pada Kamis, 27 Januari 2025.
- Indarti, S. H. (2017). "Pembangunan Indonesia dalam Pandangan Amartya Sen". *IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration*, 3 (1): 35-40.
- Institut KAPAL Perempuan. (2016, Maret 10). "Feminisasi Kemiskinan", *Institut KAPAL Perempuan*, 10 Maret. Tersedia dalam <https://kapalperempuan.org/feminisasi-kemiskinan/> diakses pada Kamis, 27 Januari 2025.
- International Labour Office. (2004). *Jender dan Kemiskinan*. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional.
- International Labour Organization. (2022). *Employment prospects in Afghanistan: A rapid impact assessment*. Bangkok: International Labour Organization.
- International Rescue Committee. (2022). "Afghanistan: An entire population pushed into poverty", *International Rescue Committee*, 22 Desember. Tersedia dalam <https://www.rescue.org/article/afghanistan-entire-population-pushed-poverty> diakses pada Jum'at, 28 Januari 2025.
- Irianto, S. (2000). *Perempuan di antara Berbagai Pilihan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lestari, O. D. (2021). "Upaya Perlawanan Perempuan Afghanistan dalam Menghadapi Ancaman Opresi/Kebijakan Opresif Taliban". *IJPSS: Indonesian Journal of Peace and Security Studies*, 3 (2): 68-74.
- Limaye, Y. (2023). "Taliban: Lima momen penting ketika hak-hak perempuan Afghanistan dihancurkan", *BBC.com*, 21 Agustus. Tersedia dalam <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-66513135> diakses pada Jum'at, 28 Januari 2025.
- Martin, A., & Saputro, M. W. (2024). "Faktor Pendorong Konflik Kelompok Taliban dalam Pengambilalihan Pemerintahan Afghanistan di Tahun 2021". *SPEKTRUM*, 21 (2): 150.
- Mekki, N. (2021). "Girls increasingly at risk of child marriage in Afghanistan". *UNICEF*, 12 November. Tersedia dalam <https://www.unicef.org/press-releases/girls-increasingly-risk-child-marriage-afghanistan> diakses pada Jum'at, 28 Januari 2025.
- Murniati, A. N. (2004). *Getar gender: Perempuan Indonesia dalam perspektif agama, budaya, dan keluarga*. Magelang: Indonesiatara.
- Nehan, N. (2022). "The Rise and Fall of Women Rights in Afghanistan". *LSE Library*, 2 (3): 6.
- Qazizada, M. (2024). "Impacts of the Taliban's ban on women's work and education", *Development Policy Centre*, 9 Februari. Tersedia dalam

- [file:///C:/Users/WINDOWS%2011%20PRO/Downloads/impacts-of-the-talibans-ban-on-womens-work-and-education-20240209.pdf%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/WINDOWS%2011%20PRO/Downloads/impacts-of-the-talibans-ban-on-womens-work-and-education-20240209.pdf%20(1).pdf) diakses pada Kamis, 27 Januari 2025.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metode Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Rohidi, T. R. (2009). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS).
- Samsuri, S. (2020). "Penguatan Pembangunan Manusia dan Pelayanan Masyarakat", *Ombudsman RI*, 18 September. Tersedia dalam <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--penguatan-pembangunan-manusia-dan-pelayanan-publik> diakses pada Rabu, 26 Januari 2025.
- Sen, A. (1999). *Poverty and Famines*. New York: Anchor Books.
- Shamimi, Z., Rijal, N. K., & Aufiya, M. A. (2022). "Efektivitas UN Women Meningkatkan Gender Equality di Afghanistan dalam Pelaksanaan Afghanistan Sustainable Development Goals (ASDG's)". *University of Jember*, 3 (1): 1-15.
- Sustainable Development Goals. (2021). "*Afghanistan - Sustainable Development Goals*", sustainabledevelopment.un.org, 11 Juni. Tersedia dalam https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/280392021_VNR_Report_Afghanistan.pdf diakses pada Minggu, 30 Maret 2025.
- Sustainable Development Report. (2024). "Afghanistan". Laporan Tahunan. Dublin: Sustainable Development Report.
- The World Economic Forum. (2021). "Global Gender Gap Report 2021". Laporan Tahunan. Switzerland: The World Economic Forum.
- The World Economic Forum. (2022). "Global Gender Gap Report 2022". Laporan Tahunan. Switzerland: World Economic Forum.
- The World Economic Forum. (2023). "Global Gender Gap Report 2023". Laporan Tahunan. Switzerland: World Economic Forum.
- UN Women. (2023). "*Women in Afghanistan: From almost everywhere to almost nowhere*", unwomen.org, 15 Agustus. Tersedia dalam <https://www-unwomen-org.translate.goog/en/news-stories/feature-story/2023/08/women-in-afghanistan-from-almost-everywhere-to-almost-nowhere? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=tc> diakses pada Minggu, 30 Maret 2025.
- UNDP. (2023). "Afghanistan Socio-Economic Outlook 2023". Kabul: UNDP.
- United Nation. (2025). "Gender equality and women's empowerment", sdgs.un.org, 20 April. Tersedia dalam <https://sdgs.un.org/topics/gender-equality-and-womens-empowerment> diakses pada Selasa, 20 April 2025.
- Wijaya, F. A. (2025). "Kekerasan Struktural Terhadap Perempuan Afghanistan di Bawah Kepemimpinan Taliban tahun 2021-2024". *Universitas Islam Indonesia*, 10.
- Yanti, H. (2025). "Feminisasi Kemiskinan Dan Kepala Rumah Tangga Perempuan Di Kabupaten Gayo Lues (Studi Kasus Pemberian Program Bantuan Kesejahteraan Janda Miskin)". *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh*, 16-20.